GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar	**: Kompas**	**Tgl/Bln/Thn**	**: 14 November 2007**
Subyek	**: Perubahan Iklim**	**Hari**	**: Rabu**
		Halaman	**: 08**

Perubahan Iklim

Negara Kepulauan Terancam Naiknya Permukaan Laut

male, selasa - Perwakilan dari 26 negara kepulauan kecil yang bertemu di ibu kota Maladewa, Male, Selasa kemarin, menyusun rancangan resolusi yang mengidentifikasi perubahan iklim sebagai ancaman bagi hak asasi manusia.

Kekhawatiran Aliansi Negara-negara Kepulauan Kecil (AOSIS) mengenai naiknya permukaan laut itu akan disampaikan melalui resolusi tersebut pada Konferensi Perubahan Iklim di Bali, bulan depan.

"Inilah waktunya untuk menarik kembali orang-orang di jantung diplomasi perubahan iklim," ungkap Presiden Maladewa Maumoon Abdul Gayoom, pada konferensi itu.

Para delegasi diyakini akan menyetujui resolusi yang menegaskan bahwa perubahan iklim mengancam hak-hak dasar, yaitu lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, dengan memaksa negara-negara sedang berkembang melihat masalah naiknya permukaan laut dari kacamata HAM.

Di Geneva, Swiss, Ketua Badan Perubahan Iklim dan Cuaca PBB, sebelumnya menyampaikan bahwa jutaan lapangan kerja di seluruh dunia akan hilang karena perubahan iklim, meskipun upaya-upaya untuk menanggulangi dampaknya juga akan menciptakan banyak lapangan kerja.

Disampaikan, pemanasan global dapat mengancam sektor perikanan dunia, mengancam industri wisata, dan mengakibatkan banyak pekerja di sektor itu kehilangan pekerjaannya.

Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP) Achim Steiner mengatakan, sejumlah lapangan kerja baru akan tercipta di sektor teknologi lingkungan, pada saat negara-negara bekerja untuk menghindarkan dan meringankan dampak dari perubahan iklim.

Steiner mencontohkan, di AS sudah lebih banyak pekerja di bidang lingkungan ketimbang mereka yang bekerja di industri farmasi. Adapun di Jerman, para pekerja lingkungan akan melampaui jumlah pekerja sektor otomotif pada tahun 2020.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Panel ilmuwan PBB

Di Valencia, Spanyol, Panel Antarpemerintahan Mengenai Perubahan Iklim (IPCC) PBB telah memulai pembicaraan dengan delegasi pemerintahan, mengenai sebuah laporan prestisius tentang kondisi pemanasan global saat ini. Muncul peringatan bahwa para pembuat kebijakan yang telah gagal mengerem panas yang diakibatkan emisi karbon dapat dianggap melakukan "kejahatan tidak bertanggung jawab".

Rajender Pachauri, Ketua IPCC yang meraih penghargaan Nobel Perdamaian 2007, mengatakan, para ilmuwan tengah mempertimbangkan untuk "menetapkan standar-standar kualitas" pada laporan keempat sekaligus akhir, yang akan dikeluarkan tahun ini.

IPCC yang terdiri dari ribuan ilmuwan akan mengeluarkan "laporan sintesisnya", Sabtu (17/11), yang merangkum tiga laporan sebelumnya yang merupakan kompilasi dari hasil penelitian 2.500 peneliti dan ratusan pakar yang mengkaji dan mengorganisasikan data-data yang mereka terima.

Yvo de Boer, Ketua IPCC, menegaskan, gas-gas rumah kaca akibat dari aktivitas manusia mengubah iklim dunia.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP